

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI KOTA BATAM

Salah satu karya cipta yang merupakan HKI dan perlu mendapat perlindungan hukum adalah program komputer, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Namun pada kenyataannya marak terjadi Pelanggaran atas hak cipta program komputer tersebut yang dilakukan oleh para penjual komputer, dengan cara menginstall atau memasukkan program komputer seperti windows tanpa memiliki lisensi dari Microsoft sebagai pemegang hak cipta yang terjadi di Kota Batam. Pertanyaan yang timbul dari problem ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap program komputer di Kota Batam?; (2) Bagaimanakah Efektifitas Otoritas di Kota Batam dalam melakukan penanganan peredaran program komputer (*software*) ilegal?

Metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil pembahasan menyimpulkan: (1) Implementasi perlindungan hukum terhadap Program Komputer di Kota Batam, belum memberikan hasil yang maksimal serta tindakan hukum yang tegas kepada pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Karya Program Komputer di Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta Program Komputer di Kota Batam, penyebabnya adalah antara lain, belum di buatnya landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang HKI di Kota Batam, tidak adanya bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kota Batam atas perlindungan hukum terhadap program komputer sebagai salah satu HKI sebagaimana diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hambatan di tersebut, menjadi penghambat pengimplementasian Perlindungan Hukum terkait atas Karya Cipta Program Komputer di Kota Batam. (2) Efektifitas Otoritas Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan penanganan peredaran Program Komputer (*software*) ilegal di Kota Batam sudah cukup efektif pada perusahaan atau instansi yang besar karena mereka takut dengan sanksi yang diberikan, tetapi untuk hal-hal yang kecil seperti penjual komputer, pengelola atau pelaku usaha warnet yang kecil-kecil dan para pengguna program komputer individu masih kurang optimal. Kendalanya adalah kurangnya sosialisasi hukum HKI Program Komputer yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, keterbatasan jumlah personil dan juga keterbatasan pemahaman personil penegak hukum tentang program komputer, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran masyarakat..

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Karya Cipta, Program komputer,

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION OF HUMAN COMPUTER PROGRAM WORKS IN BATAM

The computer program is one of the objects which protected by copyright law. But in the midst of society found a lot of circulation of illegal computer programs. The questions from this research are: (1) How is the implementation of legal protection of computer programs in Batam?; (2) How does Batam Authority in handling the distribution of computer programs (software) illegal?

The method of this study is using juridical empirical approach. The data that used are primary and secondary data. Method of data collection used interviews and literature. Methods of data analysis using qualitative analysis.

The results of the discussion has concluded: (1) The responsible party for the legal protection of computer programs in Batam is the Local Government and it implemented by law enforcement. IPR regulations which used in Batam refers to the rules made by the Central Government, and specifically in the police neighborhood refers to the Criminal Investigation Police. The efforts that done by the local government through the Police Batam Riau Islands is to socialize the importance of respecting copyright and to keep the public to not make violation for the copyrights of others; (2) The effectiveness of the countermeasures circulation implementation for illegal computer programs in Batam city is quite effective, especially in companies or agencies because they are afraid of the provided sanctions, but for small things such the sellers of retail computers and the user program home computers are still less than optimal. Constraints faced by the City of Batam in the fight against the circulation of illegal computer programs, among: the limited number of staff and lack of understanding of law enforcement staff on a computer program, the lack of facilities and infrastructure, and lack of public awareness.

Keywords: Legal protection, computer programs